

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sertadapat menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang antara lain : meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (HAW. Widjaja, 2002).

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah diseluruh wilayah Indonesia, sebagai konsekuensi pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-UndangNo.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004). Melalui pelimpahan kewenanganini peranan keuangan daerah akan semakin penting karena pemerintah daerah dituntutuntuk lebih aktif dalam mengelola sumber dananya sendiri. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk

menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri yang terbesar (Tambunan, 2001). Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah perlu dikaji dan dioptimalkan potensi ekonomi daerah tersebut untuk meningkatkan penerimaan daerah itu sendiri. Semakin meningkat penerimaan dari daerah sendiri, maka sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah untuk mensejahterakan penduduknya (Juli Panglima Saragih, 2000).

Di Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah otonom yang mana mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, salah satu upaya pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah, pajak merupakan salah satu komponen PAD yang sangat berpotensi dan mempunyai prospek yang bagus, ditambah juga di Provinsi Sumatera Barat masih menyimpan rasi warisan budaya, adat, dan ciri khas yang lain. Sehingga Provinsi Sumatera Barat menjadi destinasi pariwisata turis lokal maupun internasional yang kemudian merangsang pembangunan infrastruktur seperti hotel, restoran, apartemen, dan fasilitas publik lainnya. Lalu pemerintah di Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pemasukan berupa pajak dari hasil pembangunan tersebut setiap tahunnya, adapun jenis-jenis pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat sesuai pasal 2 undang-undang No. 34 tahun 2000 terdiri dari : Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak material bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak Air bawah tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2002 sampai 2017

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
2002	166.909,00	
2003	218.853,92	31,12
2004	307.314,46	40,42
2005	411.331,75	33,85
2006	406.628,24	-1,14
2007	411.331,75	1,16
2008	513.232,70	24,77
2009	619.270,40	20,66
2010	768.724,37	24,13
2011	983.602,41	27,95
2012	994.570,03	1,12
2013	1.085.164,29	9,11
2014	1.354.541,15	24,82
2015	1.445.611,64	6,72
2016	1.522.119,23	5,29
2017	1.626.923,37	6,89

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2002-2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perkembangan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2002 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 realisasi pajak daerah mencapai Rp. 166.909,00 juta meningkat menjadi Rp. 411.331,75 juta dengan pertumbuhan 33,85 persen. Pada tahun 2011 merupakan peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 24,82 persen dengan total realisasi mencapai Rp.983.602,41 juta. Hingga akhir tahun 2017 total realisasi pajak daerah Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp. 1.626.923,37 juta dengan pertumbuhan mencapai 6,89 persen.

Sedangkan perkembangan Industri di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2002 sampai 2017

Tahun	Industri (Unit)	Pertumbuhan (Persen)
2002	158	
2003	152	-3,80
2004	151	-0,66
2005	138	-8,61
2006	178	28,99
2007	178	0,00
2008	182	2,25
2009	158	-13,19
2010	139	-12,03
2011	135	-2,88
2012	143	5,93
2013	140	-2,10
2014	143	2,14
2015	162	13,29
2016	165	1,85
2017	167	1,21

Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2002-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2002 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 jumlah industri besar dan sedang berjumlah 158 unit berkurang menjadi 152 unit atau sekitar 3,80 persen pada tahun 2003 dan terjadi lagi penurunan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2004 sebesar 0,66 persen sehingga jumlah menjadi 151 unit. Pada tahun 2005 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 138 unit atau berkurang sebesar 8,61 persen dan kembali meningkat pada tahun 2006 hingga 178 unit atau bertambah sebesar 28,99 persen. Pada tahun 2007 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 178 unit atau sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 182 unit atau bertambah sebesar 2,25 persen. Pada tahun 2009 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 158 unit atau berkurang sebesar 13,19 persen. Pada tahun 2010 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 139 unit atau berkurang sebesar 12,03 persen. Pada tahun 2011 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 135 unit atau berkurang sebesar 2,88 persen. Pada tahun 2012 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 143 unit atau bertambah sebesar 5,93 persen. Pada tahun 2013 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 140 unit atau berkurang sebesar 2,10 persen dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebesar 2,14 persen sehingga jumlah menjadi 143 unit. Pada tahun 2015 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 162 unit atau bertambah sebesar 13,29 persen. Pada tahun 2016 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 165 unit atau bertambah sebesar 1,85 persen. Pada tahun 2017 jumlah industri di Provinsi Sumatera Barat mencapai 167 unit atau bertambah sebesar 1,21 persen.

sedang di Provinsi Sumatera Barat mencapai 167 unit dengan pertumbuhan mencapai 1,21 persen.

Selain itu Inflasi yang terjadi di suatu negara dapat mempengaruhi jumlah penerimaan di sektor pajak. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan *output* yang cepat adalah dengan melakukan pembangunan untuk mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah. Namun hal tersebut ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dalam keadaan demikian, dapat dijumpai kenaikan harga yang diperkirakan merupakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Pada kondisi seperti ini, pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan *output* tanpa menaikkan pajak, yang dapat menyebabkan permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintaan) (Wantara, 1997).

Perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2002 sampai 2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2002 inflasi sebesar 7.47 persen menurun menjadi 3.29 persen pada tahun 2003, inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dengan inflasi sampai 12,68 persen, dan inflasi paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan inflasi di Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 0.85 persen (Sumatera Barat Dalam Angka, 2002-2017).

**Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi di Sumatera Barat
Tahun 2002-2017**

Tahun	Inflasi (Persen)	Pertumbuhan (Persen)
2002	7,47	-
2003	3,29	-0,56
2004	10,42	2,17
2005	4,44	-0,57
2006	8,05	0,81
2007	6,9	-0,14
2008	12,68	0,84
2009	2,05	-0,84
2010	7,84	2,82
2011	5,83	-0,26
2012	4,16	-0,29
2013	10,87	1,61
2014	11,9	0,09
2015	0,85	-0,93
2016	5,02	4,91
2017	2,13	-0,58

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain itu Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena *support* finansial pembangunan bersumber dari rakyat itu sendiri. Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya.

Selama periode tahun 2002 – 2017. Pada tahun 2002 PDRB Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp. 67.093.347,13 juta meningkat menjadi Rp 70.622.457,21 juta dengan pertumbuhan mencapai 5,26 persen. Sedangkan pada tahun 2004 jumlah PDRB Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp.74.488.546,87 juta dengan pertumbuhan mencapai 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dengan pertumbuhan sebesar 6,88 persen. Hingga

akhir tahun 2017 PDRB Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp. 155.963.985,42 juta dengan pertumbuhan 5,29 persen.

Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.4:

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan PDRB Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2002 – 2017

Tahun	PDRB Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
2002	67.093.347,13	
2003	70.622.457,21	5,26
2004	74.488.546,87	5,47
2005	78.759.756,91	5,73
2006	83.595.801,72	6,14
2007	88.897.928,16	6,34
2008	95.012.084,18	6,88
2009	99.081.427,68	4,28
2010	104.966.646,97	5,94
2011	111.533.336,43	6,26
2012	118.643.641,61	6,38
2013	125.978.991,99	6,18
2014	133.340.836,44	5,84
2015	140.719.474,19	5,53
2016	148.134.243,89	5,27
2017	155.963.985,42	5,29

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2002-2017

Dalam memenuhi dan melaksanakan kegiatan pemerintahannya kebutuhan dana pemerintah Indonesia meningkat dari tahun ketahun. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari masyarakat Indonesia itu sendiri melalui pemugutan pajak. Dan sumber penerimaan pajak daerah itu sendiri berasal dari pajak penghasilan. Pajak dalam negeri maupun daerah diklasifikasikan pemerintah daerah kedalam bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan objek daripada wajib pajak.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Di Provinsi Sumatera Barat Tahun
2002 Sampai 2017 (jiwa)

Tahun	Jumlah wajib pajak	Pertumbuhan
2002	16.690,9	
2003	218.853,92	31,12
2004	307.314,46	40,42
2005	411.311,75	33,84
2006	406.628,24	-1,14
2007	411.311,75	1,15
2008	513.232,7	24,78
2009	619.270,4	20,66
2010	768.724,37	24,13
2011	983.602,41	27,95
2012	994.570,03	1,12
2013	1.085.164,29	9,11
2014	1.354.541,15	24,82
2015	1.445.611,64	6,72
2016	1.522.119,23	5,29
2017	1.626.923,37	6,89

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2002-2017

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah wajib Pajak di Provinsi Sumatera Barat selalu meningkat. Pada tahun 2002 jumlah wajib pajak mencapai 16.690,9 jiwa meningkat menjadi 218.853,92 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah wajib Pajak meningkat menjadi 768.724,37 jiwa dan terus meningkat hingga akhir tahun 2017 dengan jumlah wajib pajak Provinsi Sumatera Barat mencapai 1.626.923,37 jiwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang peneliti maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak daerah Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah wajib pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mmengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah.

1. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sewaktu duduk di bangku perkuliahan.
2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bahan kebijakan pengambilan keputusan terutama dalam upaya peningkata pajak daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk memahami mengenai seberapa besar penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Bagi peneliti sesudah, penelitian ini dapat menjadi referensi dan menjadi sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari fenomena kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan landasan teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan ekonomi , teori A.W. Phillips, teori ketenagakerjaan, teori

pengangguran, teori upah. Di samping itu, pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang dapat diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.